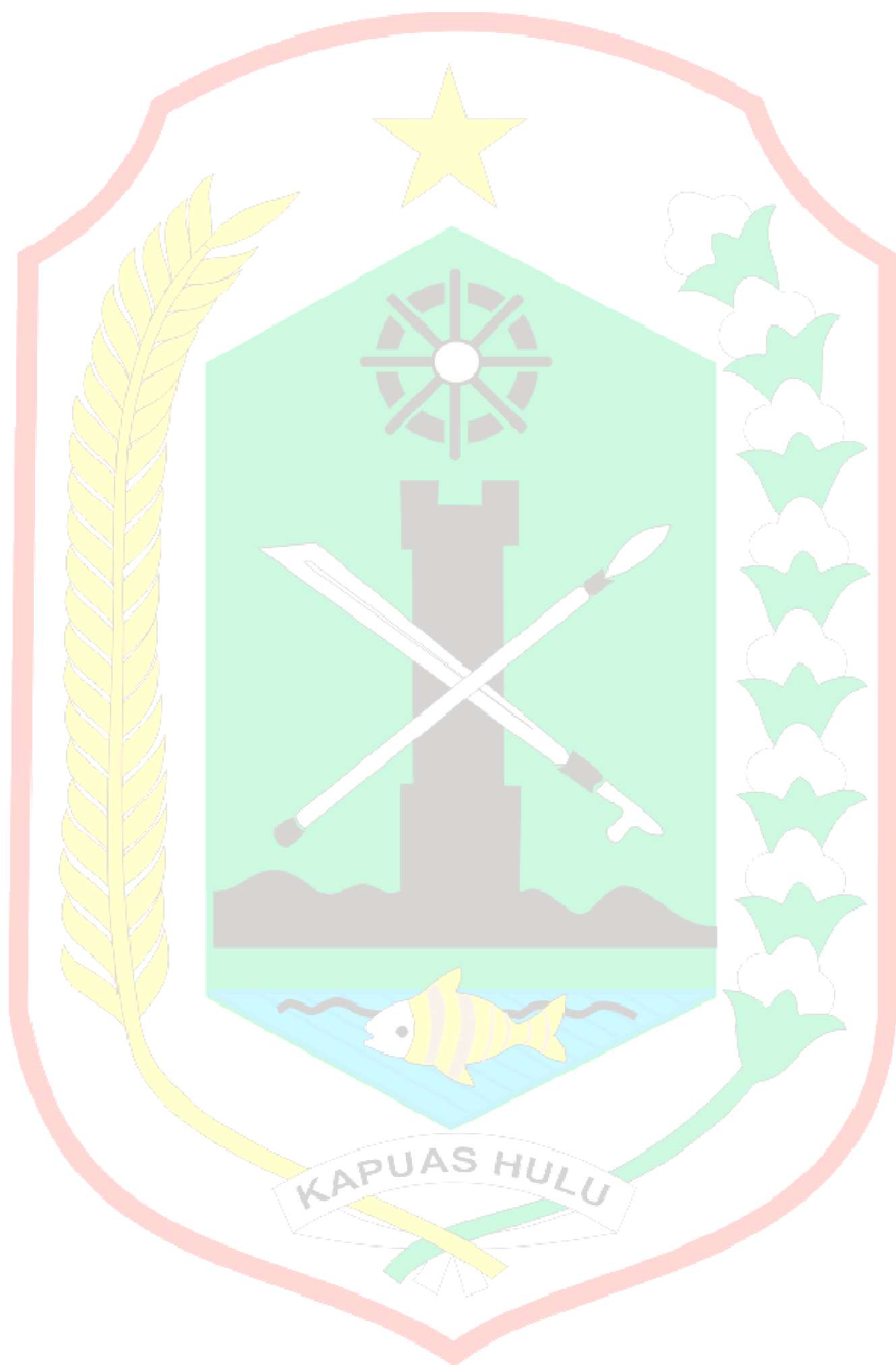


The logo of Kabupaten Kapuas Hulu is a large shield with a red border. At the top is a yellow five-pointed star. Below the star, the text "Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2016-2021" is written in bold black font. The central part of the shield features a smaller shield with a red border. This inner shield contains a yellow star at the top, a green field with a black cross and a black tower, and a blue field with a yellow and orange striped fish. Below the inner shield is a banner with the text "KAPUAS HULU". The entire shield is flanked by a yellow rice stalk on the left and a green and white floral garland on the right. At the bottom of the shield is a blue field with a yellow and orange striped fish.

**Rencana Strategis
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif dengan data yang akurat, lengkap, aktual dan relevan sesuai permasalahan dan kebutuhan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu ini berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini disusun dengan merujuk kepada Renstra Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Bidang Perempuan dan KB Tahun 2010, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial pada Bidang Sosial Tahun 2010, dengan adanya perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 kami berharap pada Tahun Anggaran 2018 adanya Penguatan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengingat luasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Putussibau,
**a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris,**

Drs. H. Durus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198403 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD 7

2.2 Sumber Daya OPD 15

2.3 Kinerja Pelayanan OPD 17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 19

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Fungsi OPD 19

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih 20

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 21

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis 22

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 22

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN 24

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 27

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 29

BAB VII PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

- 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 – 2016
- 2.2 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 – 2016
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 – 2021
- 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya Renstra Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan

dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategik adalah sebagai berikut :

A. Landasa Idiil yaitu Pancasila,

B. Landasan Konstitusi Yaitu UUD 1945,

C. Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan dari RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan berpedoman pada RPJM 2017-2021;
2. Merumuskan Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016-2021;
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta

melibatkan *stakeholders* Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga;
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis

5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

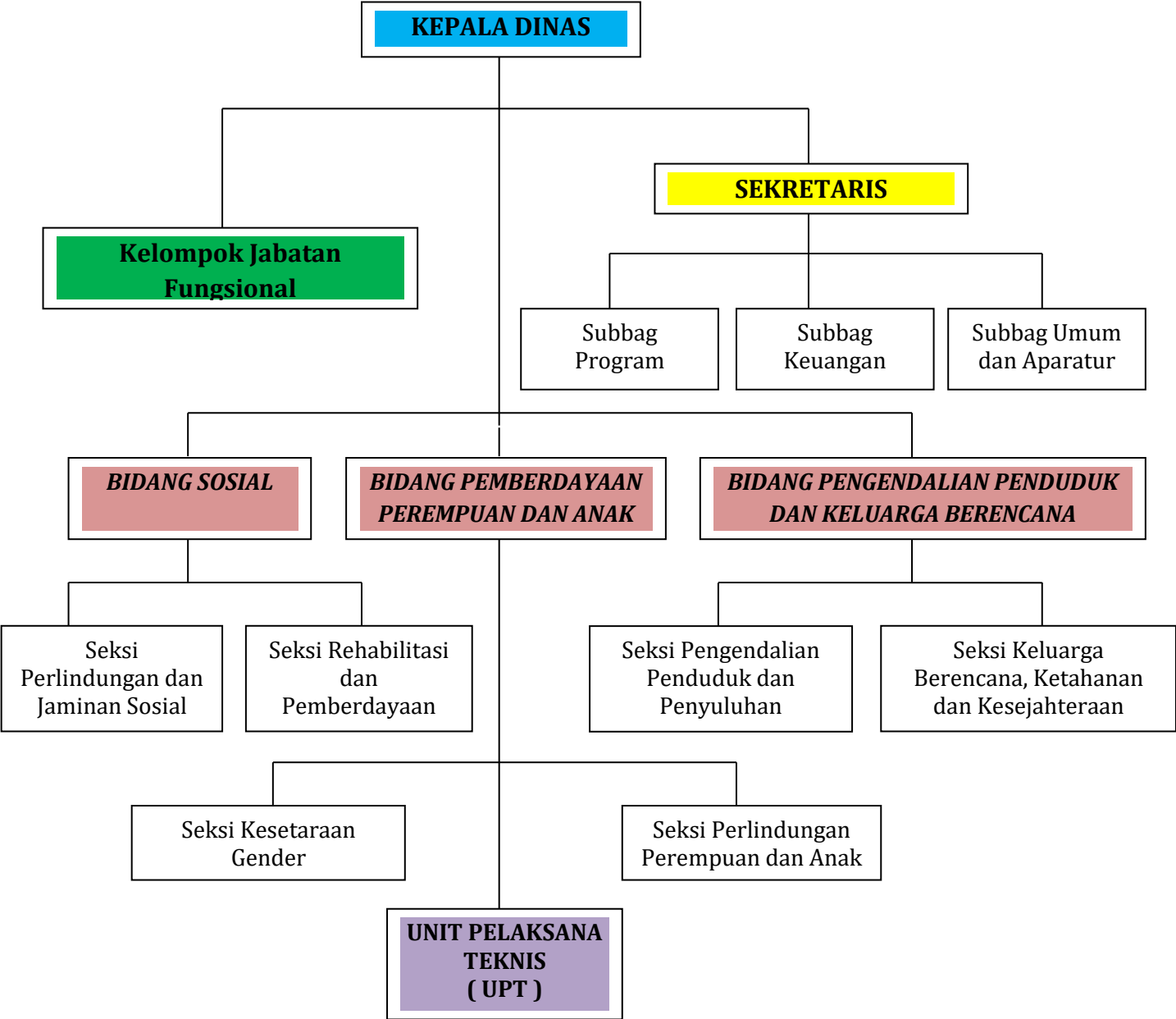
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pemantauan, Pengawasan dan Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Tata Laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Kerja Dinas;
- f. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Program

Subbag Program mempunyai tugas Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian dan Pelaporan Rencana Kerja Dinas. Subbag Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Subbag Program;
- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksana Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran;
- Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- Pelaksanaan Harmonisasi dan Singkronisasi Program Kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- Pengendalian dan Pelaporan Kerja Dinas;
- Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Subbag Program; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Subbag Keuangan mempunyai tugas Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian dan Pelaporan Rencana Kerja Dinas. Subbag Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Subbag Keuangan;
- Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Dinas;
- Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Subbag Keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Subbag Umum dan Aparatur adalah unsur pembantu Pimpinan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi Kepegawaian, Pengembangan Aparatur, Tata Usaha, Rumah Tangga, Perpustakaan, Kearsipan, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Barang Milik Dinas. Subbag Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Subbag Umum dan Aparatur;
- Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Dinas;
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
- Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perpustakaan;

- Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Subbag Umum dan Aparatur; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG SOSIAL

Bidang Sosial adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Sosial;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang Sosial;
- c. Pelayanan Rehabilitas Sosial;
- d. Pelayanan Jaminan Sosial;
- e. Pelayanan Pemberdayaan Sosial;
- f. Pelayanan Perlindungan Sosial;
- g. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Sosial secara Periodik;
- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Sosial secara Periodik; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan Bantuan Sosial, Advokasi dan Bantuan Hukum;
- Pemeliharaan anak-anak terlantar;
- Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- Penyediaan Kebutuhan Dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten;

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten;
- Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
- Pemberdayaan Sosial komunitas adat tertinggal;
- Penertiban izin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- Pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Keluarga (L3K);
- Rehabilitas Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrom* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada Panti dan Rehabilitasi Anak yang berhadapan pada hukum;
- Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Perempuan;
- e. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan Penuh kembangkan Hak Anak;
- g. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Periodik;
- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kesetaraan Gender

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesetaraan Gender melaksanakan fungsi :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Kesetaraan Gender;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan;
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
- Pelaksanaan penyajian data dan informasi gender;
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesetaraan Gender;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesetaraan Gender melaksanakan fungsi :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan kualitas hidup;
- Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Penyiapan kebijakan dan pengawasan pemenuhan hak-hak anak;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera penyelenggaraan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Pengelolaan data dan informasi keluarga;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
- Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
- Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
- Pemetaan Pengendalian Penduduk;
- Pelaksana sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pelaksana Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana;
- Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksana tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluh; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Penyiapan petunjuk teknis dn petunjuk pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Pelaksanaan Penerima, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi;
- Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana;
- Pembinaan Keluarga Lansia dan Rentan;
- Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada di dalam lingkup kerja

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas hulu berjumlah 31 (Tiga Puluhan Satu) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018

Magister (S-2)	Sarjana (S-1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Total
3	17	1	10	0	0	31

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018

Laki-Laki	Perempuan	Total
16	15	31

2.2.2 Asset / Modal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggaran belanja daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1 Urusan Sosial

Capaian Kinerja Layanan Umum urusan Sosial diukur dengan indikator :

1. Persentase Penanganan PMKS
2. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Penyandang Cacat dan Trauma mendapat Bantuan dan Pembinaan

2.3.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Layanan Umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator :

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
2. Rasio KDRT
3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
4. Penyelesaian Pengaduan
5. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

2.3.3 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Layanan Umum pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dengan indikator :

1. Rasio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
2. Rasio Akseptor KB Baru
3. Angka Kelahiran Total
4. Prevalensi KB Aktif, Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB) di setiap Desa/Kelurahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4.1 Tantangan

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi
- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender.
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan.
- d. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender.
- e. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
- f. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.

- g. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
- h. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
- i. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB.
- j. Masih rendahnya komitmen remaja tentang penanggulangan masalah KRR.
- k. Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah.
- l. Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB.
- m. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR.
- n. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.
- o. Masih rendahnya APE di kelompok BKB

2.4.2 Peluang

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi, dengan terjadinya Koordinasi yang baik antara Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan untuk memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Adanya Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Sedangkan untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 – Tahun 2016 terlampir.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Aparatur, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program, Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini antara lain :

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi
- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender.
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan.
- d. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender.
- e. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
- f. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
- g. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
- h. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
- i. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program KB.
- j. Masih rendahnya komitmen remaja tentang penanggulangan masalah KRR.
- k. Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah.
- l. Masih rendahnya partisipasi kelompok masyarakat peduli KB.
- m. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR.
- n. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu

Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, maka ditetapkan visi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

" Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis "

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari tiga misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat pada misi ke dua. Dari misi tersebut tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ingin dicapai antara lain adalah :

- a. Persentase PMKS yang tertangani
- b. Persentase anaka yang berhadapan dengan hukum
- c. Rasio KDRT
- d. Indeks Pemberdayaan Gender
- e. Prevalensi KB Aktif / Pasangan Usia Subur
- f. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate / TFR*)

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dengan indikator :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana
- c. Meningkatnya Perlindungan Anak dan Perempuan
- d. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

a. Sasaran Strategis urusan Sosial

1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar
3. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
4. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

b. Sasaran Strategis urusan PP dan PA

1. Jumlah Kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
2. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
3. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
4. Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
5. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dengan satuan ukur persentase

c. Sasaran Strategis urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan Prevalensi TFR yang tidak diinginkan dari WUS (15- 49 tahun)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang aturan pelaksanaan sesuai karakteristik kondisi daerah. Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya dan kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan berkelanjutan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta perlembagaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fenomena berbagai kasus perempuan, keluarga, remaja dan anak dapat muncul sebagai dampak kebijakan pemerintah dan atau implikasi dari dinamika perubahan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat. Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial budaya ekonomi politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap rendahnya proporsi perempuan dalam menduduki jabatan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

A. Urusan Sosial

Beberapa isu strategis dalam pembangunan urusan sosial, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan;
- 2) Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum optimal;
- 3) Kualitas, Kuantitas serta Kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan;
- 4) Sarana, Prasarana, seta SDM dalam penanggulangan bencana masih relatif terbatas;
- 5) Manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu semakin ditingkatkan.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Selain itu, masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Terdapat beberapa isu strategis terkait pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- 1) Penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 2) Peningkatan Perlindungan Perempuan;
- 3) Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Belum Optimal;

Permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak. Disamping itu, masih terdapat anak yang tidak bersekolah yang disebabkan kemiskinan. Di bidang kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya Kematian bayi dan balita.

C. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa isu strategis pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yaitu :

- 1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Belum Optimal;

Beberapa permasalahan pelayanan KB yang dihadapi antara lain masih terbatasnya tenaga penyuluh KB; Advokasi KIE masih belum optimal; peran serta institusi masyarakat dan penggarapan kewilayah sasaran masih terbatas; akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum optimal serta masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya peningkatan ketahanan keluarga. Peningkatan kesejahteraan peserta KB yang berasal dari keluarga perlu mendapat perhatian mendalam. Hal ini juga diarahkan bagaimana peningkatan ketahanan keluarga menjadi prioritas yang sejalan dengan keberhasilan program KB.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB
2. Menurunnya Angka PMKS
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja DISOSP3AP2KB
2. Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sarana Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Meningkatnya Kinerja Aparatur DISOSP3AP2KB	1	Predikat SAKIP	-	C	CC	B	BB	BB
2	Menurunnya Angka PMKS	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	16.901 Jiwa	14.428 Jiwa	14.428 Jiwa	14.350 Jiwa	14.200 Jiwa	14.000 Jiwa
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Rasio KDRT	0,0034%	0,00012%	0,00008%	0,00006%	0,00004%	0,00003%
			2	Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00015%	0,00007%	0,00010%	0,00007%	0,00006%	0,00005%
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender	19,46%	26,63%	27,00%	28,20%	28,45%	29,00%
4	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	1	Prevalensi KB Aktif	77,89%	80,67%	80,70%	80,80%	80,90%	81,00%

			2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	-	56,58%	58,62%	60,54%	60,56%	61,42%
--	--	--	---	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut.

1. Urusan Sosial

a. Strategi

- Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Hidup bagi PMKS dengan Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial melalui Peningkatan Pemberdayaan, Penyuluhan, Bimbingan Bantuan dan Jaminan Sosial

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Strategi

- Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
- Meningkatkan penguatan organisasi perempuan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.

b. Arah Kebijakan

- Meningkatkan Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik yang memperhitungkan Kesetaraan Gender

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Strategi

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
- Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
- Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
- Menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana

b. Arah Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Akses Pelayanan KB kepada Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan,yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dalam Restra Dinas Sosial, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		4. Penyediaan jsa administrasi keuangan
		5. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
		6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		7. Penyediaan alat tulis kantor
		8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
		9. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
		13. Penyediaan Makanan dan Minuman
		14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		15. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
		16. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
		17. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
		2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		3. Pengadaan Mebeleur
		4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
		5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
		6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor
		7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung / Kantor
		8. Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
		2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		4. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
		5. Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
		6. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
		7. Penyusunan LPPD
		8. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

6	Program Rehabilitasi Sosial	1. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pebinaan Anak Terlantar
		2. Koordinasi, Konsultasi Perumusan dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan serta Penurunan Kesenjangan
		3. Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
		4. Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
		5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Kerja bagi Keluarga Miskin/Anak Terlantar
		2. Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang terlantar
		3. Mobilisasi dan pendistribusian bantuan sosial
		4. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
		5. Pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni
		6. Pembinaan kelompok usaha bersama dan program keluarga harapan
		7. Pendampingan pelaksanaan bantuan beras sejahtera
8	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah
		2. Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Lainnya
9	Program Perlindungan Perempuan	1. Sosialisasi UU PKDRT, UU Traficking
		2. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
		3. Perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
		4. Advokasi, sosialisasi dan pembentukan P2TP2A
		5. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
		6. Pelatihan operator sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

		7. Peningkatan kualitast tenaga pendamping korban tindak kekerasan
		8. Peningkatan kapasitas pengelolaan P2TP2A
		9. Fasilitasi penanganan KDRT dan Trafficking
		10. Rakernas
		11. Jaringan kelembagaan FAD
		12. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan
10	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Forum anak daerah
		2. Peringatan hari anak nasional
		3. Perda perlindungan anak
		4. Peningkatan kapasitas FAD
		5. Operasional FAD
		6. Sosialisasi FAD
		7. Advokasi, sosialisasi dan pembentukan kabupaten layak anak
		8. Sosialisasi UU perlindungan anak
		9. Fasilitasi anak korban kekerasan
		10. Fasilitasi kebijakan layak anak
		11. Fasilitasi penanganan anak berhadapan dengan hukum
		12. Perda Kabupaten Layak Anak
11	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Bimbingan management usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha
		2. Pelatihan peningkatan dan pengembangan kepribadian perempuan dan organisasi-organisasi
		3. Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender tingkat kecamatan
		4. Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
		5. Pelatihan keterampilan
		6. Evaluasi pelaksanaan PUG tingkat kecamatan
		7. Pembinaan organisasi perempuan
		8. Rakornas
		9. Sosialisasi tentang peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
		10. Pembentukan pokja PUG

		11. Gerakan sayang ibu
		12. Pendataan data terpilih
12	Program Keluarga Berencana	1. TNI-Manunggal - KB Kesehatan
		2. Kesatuan Gerak Bhayangkara - KB Kesehatan
		3. Kesehatan Gerak PKK - KB Kesehatan
		4. Kampung KB
		5. Pojok Kependudukan
		6. Operasional pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
13	Program Keluarga Sejahtera	1. Pembinaan genre dan pusat informasi dan konsultasi reproduksi remaja
		2. Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB (BKB,BKR dn BKL)
		3. Pameran produksi dan harganas
14	Program Pengendalian Penduduk	1. Sosialisasi persiapan pembentukan sekolah siaga kependudukan (SSK)
		2. Workshop/pembinaan SSK
		3. Sosialisasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian penduduk
		4. Pemetaan dan pengumpulan data pengendalian kependudukan dan KB
		5. Sosialisasi dampak keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk
		6. Workshop PLKB/PKB
		7. Monitoring, evaluasi dan pembinaan PLKB/PKB

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan bagi pelaksanaan program KB dan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Dinas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021.

Meskipun Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis , namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Kapuas Hulu, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2011-2015

[illegible]

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2011 - 2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sarana Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	1	Predikat SAKIP	-	C	CC	B	BB	BB
2	Menurunnya Angka PMKS	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	113.357	113.357	113.357	124.714	130.950	133.569
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Rasio KDRT	0,0034%	0,00012%	0,00008%	0,00006%	0,00004%	0,00003%
			2	Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00015%	0,00007%	0,00010%	0,00007%	0,00006%	0,00005%
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender	19,46%	26,63%	27,00%	28,20%	28,45%	29,00%
4	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	1	Prevalensi KB Aktif	77,89%	77,90%	77,95%	78,29%	78,35%	78,50%
			2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	-	56,58%	58,62%	60,54%	60,56%	61,42%

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2016 - 2021

Visi : Menuju Kapuas Hulu yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis				
Misi 2 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Meningkatkan Kualitas SDM dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Meningkatkan peran SDM dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB
2	Menurunnya Angka PMKS	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatnya Kualitas Hidup bagi PMKS dengan Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial melalui Peningkatan Pemberdayaan, Penyuluhan, Bimbingan Bantuan dan Jaminan Sosial
			Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	
			Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik yang memperhitungkan Kesetaraan Gender
		Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatkan penguatan organisasi perempuan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan	
4	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan	Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Akses Pelayanan KB kepada

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
			06 01 01	Program Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya			1.771.281.000		1.940.309.100		2.134.340.010		2.347.976.210		2.582.773.731			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	80%	5.000.000	80%	5.500.000	80%	6.050.000	85%	6.655.000	85%	7.320.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran	0	36 Bulan	50.000.000	36 Bulan	55.000.000	36 Bulan	60.500.000	36 Bulan	66.550.000	36 Bulan	73.205.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	181.500.000	1 Paket	199.650.000	1 Paket	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	0	4	30.000.000	4	30.300.000	4	33.330.000	4	36.663.000	4	40.329.300			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi	0	75%	78.180.000	75%	85.998.000	80%	94.597.800	85%	104.057.580	90%	114.463.338			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Pengamanan dan Kebersihan Kantor	0	4 Org	56.400.000	4 Org	62.040.000	4 Org	68.244.000	4 Org	75.068.400	4 Org	82.575.240			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	75%	5.852.000	75%	6.437.200	80%	7.080.920	85%	7.891.900	90%	8.680.100			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Jumlah ATK	0	75%	21.330.000	75%	23.463.000	80%	25.809.300	85%	28.390.230	90%	31.229.253			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	0	95%	8.705.000	95%	9.575.500	95%	10.533.050	95%	11.587.000	95%	12.745.700			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 10	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan	Persentase Komponen Instalansi Listrik /	0	85%	15.000.000	85%	16.500.000	90%	18.150.000	95%	19.965.000	95%	21.961.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	80%	307.814.000	80%	338.595.400	85%	372.454.940	90%	409.800.000	95%	450.780.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PersentasePeralatan Rumah Tangga	0	75%	65.000.000	75%	71.500.000	80%	78.650.000	85%	86.515.000	90%	95.166.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	persentaseBahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0	75%	5.000.000	80%	5.500.000	85%	6.050.000	90%	6.655.000	95%	7.320.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman	0	95%	72.000.000	95%	79.200.000	95%	87.120.000	95%	95.832.000	95%	105.415.200			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	persentaseASN yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	95%	530.000.000	95%	583.000.000	95%	641.300.000	95%	705.430.000	95%	775.973.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 16	Raapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	0	95%	150.000.000	95%	165.000.000	95%	181.500.000	95%	199.650.000	95%	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 17	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ASN yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa	0	85%	30.000.000	85%	30.300.000	85%	33.330.000	90%	36.663.000	95%	40.329.300			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 18	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase ASN yang menangani Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	0	90%	30.000.000	90%	30.300.000	90%	33.330.000	95%	36.663.000	95%	40.329.300			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 19	Penyusunan RKA - DPA OPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	1 Dokumen	7.320.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 20	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pendukung Adminstrasi Kantor	0	4 Org	95.000.000	4 Org	104.500.000	4 Org	114.950.000	4 Org	126.445.000	4 Org	139.089.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 01 21	Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB	Persentase Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB	0	80%	61.000.000	85%	67.100.000	90%	73.810.000	90%	81.191.000	95%	89.310.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparaturn dalam kondisi "BAIK"			1.395.000.000		1.534.500.000		1.687.950.000		1.856.745.000		2.042.419.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 02	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	PersentaseKedaraan Dinas / Operasional	0	80%	500.000.000	80%	550.000.000	85%	605.000.000	90%	665.500.000	95%	732.050.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor	0	80%	150.000.000	80%	165.000.000	85%	181.500.000	90%	199.650.000	95%	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 04	Pengadaan Mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	0	80%	150.000.000	80%	165.000.000	85%	181.500.000	90%	199.650.000	95%	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung	0	80%	100.000.000	80%	110.000.000	85%	121.000.000	90%	133.100.000	95%	146.410.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Kendaraan Dinas	0	80%	145.000.000	80%	159.500.000	85%	175.450.000	90%	192.995.000	95%	212.294.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung / Kantor	0	80%	50.000.000	80%	55.000.000	85%	60.500.000	90%	66.550.000	95%	73.205.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 02 08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung / Kantor	Persentase Perlelataan Gedung / Kantor	0	80%	50.000.000	80%	55.000.000	85%	60.500.000	90%	66.550.000	95%	73.205.000			DISOSP3AP2KB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	11	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
			06 01 02 09	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Persentase Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	0	80%	250.000.000	80%	275.000.000	85%	302.500.000	90%	332.750.000	95%	366.025.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam 1 Tahun			145.000.000		159.500.000		175.450.000		192.995.000		212.294.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	0	80%	70.000.000	85%	77.000.000	90%	84.700.000	95%	93.170.000	95%	102.487.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 03 02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	0	80%	75.000.000	85%	82.500.000	90%	90.750.000	95%	99.825.000	95%	109.807.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			241.000.000		265.100.000		291.610.000		320.771.000		352.848.100			DISOSP3AP2KB	
			11 02 04 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	80%	241.000.000	85%	265.100.000	90%	291.610.000	95%	320.771.000	95%	352.848.100			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			64.000.000		70.400.000		77.440.000		85.192.000		93.710.400			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 04	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 05	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 06	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 07	Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 05 08	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya yang tertangani			334.531.600		305.954.700		404.014.247		408.054.389		412.134.931			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 01	Pelatihan Keterampilan Praktek Kerja bagi anak terlantar	pembinaan dan bimbingan terhadap anak terlantar dan kurang mampu	0	15 Org	31.364.400	10 Org	37.153.000	20 Org	37.524.530	25 Org	37.899.775	30 Org	38.278.773			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 02	Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin / Orang Terlantar	Pendataan PMKS dan PSKS	0	85.943 Org	22.170.000	85.943 Org	13.757.500	85.800 Org	13.895.075	85.000 Org	14.034.026	75.000 Org	14.174.368			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 03	Mobilisasi dan Pendistribusian Bantuan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	0	1 Thn	54.209.300	1 Thn	45.483.000	1 Thn	45.937.830	1 Thn	46.397.208	1 Thn	46.861.180			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 04	Koordinasi, Konsultasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pcuruan Kesenianan	Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Kesejahteraan Sosial	0	1 Thn	80.332.800	1 Thn	60.553.200	1 Thn	61.158.732	1 Thn	61.770.319	1 Thn	62.388.022			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 05	Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat Miskin berumah Tidak Layak Huni	0	1 Thn	64.253.300	1 Thn	64.072.600	1 Thn	64.713.326	1 Thn	65.360.459	1 Thn	66.014.063			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 06	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Program Keluarga	Kelompok Masyarakat Miskin dan PKH	0	30 Org	82.210.800	50 Org	84.935.400	50 Org	85.784.754	50 Org	86.642.602	50 Org	87.509.027			DISOSP3AP2KB	
			06 01 06 07	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Bimbingan terhadap Penyandang masalah masalah sosial	0	0	0	0	0	20 Org	95.000.000	25 Org	95.950.000	30 Org	96.909.500			DISOSP3AP2KB	
			06 01 07	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			130.434.300		168.787.000		170.494.870		172.179.619		173.901.413			DISOSP3AP2KB	
			06 01 07 01	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan dan Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	0	15 Org	31.439.000	10 Org	39.250.000	20 Org	39.642.500	25 Org	40.038.925	30 Org	40.439.314			DISOSP3AP2KB	
			06 01 07 02	Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja Migran Bermasalah	0	1 Thn	13.610.000	1 Thn	12.837.000	1 Thn	12.965.370	1 Thn	13.095.024	1 Thn	13.225.973			DISOSP3AP2KB	
			06 01 07 03	Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Pemberdayaan dan Bimbingan terhadap Penyandang Disabilitas dan Pelayanan terhadap Penyandang Penyakit Kejiwaan	0	27 Org	85.385.300	10 Org	116.700.000	20 Org	117.887.000	25 Org	119.045.670	30 Org	120.236.126			DISOSP3AP2KB	
			06 01 07 04	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang dilayani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DISOSP3AP2KB	
			06 01 08	Program Pemberdayaan Kelendagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan			244.532.700		297.458.300		685.432.883		692.287.212		699.210.083			DISOSP3AP2KB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017				2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							target	Rp.			target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	11	11		12	13	14	15	16	17		18	19			20	21
			06 01 08 01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Pemeliharaan TMP	0	1 Thn	77.724.300		1 Thn	67.492.000	1 Thn	68.166.920	1 Thn	68.948.589	1 Thn	69.537.075				DISOSP3AP2KB	
			06 01 08 02	Pembinaan PMS, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Lainnya	Pemberdayaan dan Bimbingan terhadap Pekerja Sosial dan Organisasi Sosial	0	27 Org	166.808.400		27 Org	229.966.300	27 Org	232.265.963	27 Org	234.588.623	27 Org	236.934.508				DISOSP3AP2KB	
			06 01 08 03	Pengembangan Kebijakan tentang Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia	Pelayanan dan bantuan	0	0	0	0	0	20 Org	75.000.000	25 Org	75.750.000	30 Org	76.507.500					DISOSP3AP2KB	
			06 01 08 04	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	Penyuluhan Sosial tentang Program dan Pelayanan terhadap PMKS	0	0	0	0	0	2 Kecamatan	65.000.000	2 Kecamatan	65.650.000	2 Kecamatan	66.306.500					DISOSP3AP2KB	
			06 01 08 05	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggung daruret kejadian luar biasa	Penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial	0	0	0	0	0	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	176.750.000	1 Tahun	178.517.500					DISOSP3AP2KB	
			06 01 08 06	Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan Pekerja Sosial	Pembinaan dan Bimbingan terhadap Pekerja Sosial	0	0	0	0	0	75 Org	70.000.000	75 Org	70.700.000	75 Org	71.407.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			318.248.700			672.152.670		1.131.842.687		915.028.956		1.006.484.652				DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 01	Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	0	85 Org	89.736.500	120 Org	122.479.500	125 Org	134.727.450	130 Org	148.200.195	135 Org	163.020.215					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 02	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional	0	100 Org	13.566.000	250 Org	50.000.000	250 Org	55.000.000	250 Org	60.500.000	255 Org	66.550.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 03	Sosialisasi UU PKORT, UU PA dan UU Trafficking	Jumlah Masyarakat yang mengikut Sosialisasi	0	80 Org	29.522.500	-	-	120 Org	92.474.750	125 Org	101.722.225	130 Org	111.849.448					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 04	Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikut Sosialisasi	0	200 Org	185.424.700	250 Org	203.967.170	150 Org	224.363.887	200 Org	246.800.276	250 Org	271.480.303					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 05	Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Partisipasi dalam Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	0	-	-	150 Org	100.000.000	150 Org	110.000.000	150 Org	121.000.000	150 Org	133.100.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 06	Sosialisasi tentang Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah Masyarakat yang mengikut Sosialisasi	0	-	-	25 Org	150.000.000	25 Org	165.000.000	25 Org	181.500.000	25 Org	199.650.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 07	Pembentukan Pokja PUG Kabupaten	Adanya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG	0	-	-	30 Org	45.706.000	30 Org	50.276.800	30 Org	55.304.280	30 Org	60.834.686					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 08	Perda tentang Perlindungan Anak	Jumlah PERDA	0	-	-	-	-	1 Perda	250.000.000	-	-	-	-					DISOSP3AP2KB	
			06 01 09 09	Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari	Jumlah PERDA	0	-	-	-	-	1 Perda	50.000.000	-	-	-	-					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			22.317.000			154.817.000		1.080.330.100		1.173.863.110		1.280.949.421				DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 01	RAKERDA dan RAKERNAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah ASN yang mengikut RAKERDA dan RAKERNAS	0	-	-	9 Org	99.330.000	9 Org	109.263.000	9 Org	120.189.300	10 Org	132.208.230					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 02	Advokasi, Pembentukan dan Sosialisasi Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peserta dari Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang Mengikut Kegiatan Advokasi dan	0	-	-	80 Org	55.487.000	80 Org	61.035.700	80 Org	67.139.270	80 Org	73.853.197					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 03	Evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dievaluasi	0	-	-	-	-	3 Kec	100.000.000	3 Kec	110.000.000	3 Kec	121.000.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 04	Advokasi dan Sosialisasi P2TP2A	Jumlah Masyarakat yang mengikut Sosialisasi	0	40 Org	22.317.000	120 Org	54.574.000	120 Org	60.031.400	130 Org	66.034.540	130 Org	72.637.994					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 05	Sosialisasi Desa Layak Anak	Jumlah Masyarakat yang mengikut Sosial	0	0	0	0	0	200 Org	250.000.000	250 Org	300.000.000	300 Org	350.000.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 06	Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Jumlah Desa	0	0	0	0	0	5 Desa	250.000.000	5 Desa	250.500.000	5 Desa	261.250.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 07	Pengembangan KIE tentang Perlindungan Perempuan	Jumlah Kecamatan yang dievaluasi	0	0	0	0	0	3 Kecamatan	50.000.000	3 Kecamatan	55.000.000	3 Kecamatan	60.000.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 10 08	Fasilitasi P2TP2A	Jumlah Perempuan yang tertangani	0	0	0	0	0	10 Org	200.000.000	10 Org	205.000.000	10 Org	210.000.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 11	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan	Cakupan Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan			269.008.800			27.686.500		155.455.150		437.838.265		312.387.092				DISOSP3AP2KB	
			06 01 11 01	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah Tenaga Pelatih yang Mengikut Pelatihan	0	-	-	-	-	4 Org	25.000.000	4 Org	27.500.000	4 Org	30.250.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 11 02	Pelatih Operator Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Jumlah Petugas yang mengikut Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	0	-	-	-	-	3 Org	25.000.000	4 Org	27.500.000	4 Org	30.250.000					DISOSP3AP2KB	
			06 01 11 03	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendamping Korban Tindak Kekerasan Pusat Layanan Terpadu	Jumlah Tenaga Pendamping yang mengikut Pelatihan	0	-	-	-	-	5 Org	50.000.000	5 Org	55.000.000	5 Org	60.500.000					DISOSP3AP2KB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10	11	20	21
			06 01 11 04	Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A	Jumlah Pengelola yang mengikuti Pelatihan	0	-	-	-	-	4 Org	25.000.000	4 Org	27.500.000	4 Org	30.250.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 11 05	Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan GSI	0	3 Kec	115.562.000	-	-	-	-	3 Kec	153.850.000	-	-			DISOSP3AP2KB	
			06 01 11 06	Pelatihan Keterampilan bagi Remaja, Perempuan dan IRT	Jumlah Remaja Perempuan dan IRT yang mengikuti Pelatihan	0	100 Org	102.766.000	-	-	-	-	100 Org	112.987.600	100 Org	124.286.360			DISOSP3AP2KB	
			06 01 11 07	Peringatan Hari Kartini	Jumlah Anak, Remaja, Perempuan dan Laki-laki yang Hadir	0	300 Org	50.730.800	300 Org	27.686.500	300 Org	30.455.150	300 Org	33.500.665	300 Org	36.850.732			DISOSP3AP2KB	
			06 01 12	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			36.551.000		40.206.100		337.226.710		370.949.381		408.044.318			DISOSP3AP2KB	
			06 01 12 01	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Pengelolaan	Jumlah Peserta	0	-	-	-	-	25 Org	143.000.000	25 Org	157.300.000	25 Org	173.030.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 12 02	Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan	Jumlah Peserta	0	-	-	-	-	4 Org	150.000.000	4 Org	165.000.000	4 Org	181.500.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 12 03	Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan	Jumlah Peserta	0	50 Org	36.551.000	50 Org	40.206.100	50 Org	44.226.710	50 Org	48.649.381	50 Org	53.514.319			DISOSP3AP2KB	
			06 01 13	Program Pemberdayaan Organisasi Kesejahteraan Perempuan	Cakupan Pemberdayaan Organisasi Kesejahteraan Perempuan							150.000.000		165.000.000		181.500.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 13 01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta	0	-	-	-	-	25 Org	150.000.000	25 Org	165.000.000	25 Org	181.500.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 14	Program Keluarga Berencana	Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru	76,9	77,21	87.796.000	79,07	207.340.000	82	224.417.000	90,01	257.298.000	100	282.817.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 14 01	NI-Manunggal - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	173	186	51.573.000	200	56.393.000	312	59.410.000	-	65.310.000	-	71.810.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 14 02	Kesatuan Gerak Bhayangkara - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	224	300	48.888.000	373	55.188.000	396	59.688.000	-	65.588.000	-	72.088.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 14 03	Kesehatan Gerak PKK - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	177	198	97.335.000	204	95.759.000	273	105.319.000	-	126.400.000	-	138.919.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 15	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru	20,99	21,05	-	-	-	-	67.800.000	-	74.300.000	-	74.300.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 15 01	Operasional pelayanan pemasangan kontrasepsi KB		150	243	-	286	-	300	67.800.000	-	74.300.000	-	74.300.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 16	Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja	Persentase dan Pengorganisasian Remaja	76,9	50	155.551.000	61	147.133.000	73	247.883.000	84	272.433.000	88	299.533.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 16 01	Pembinaan operasional, pusat informasi dan konsultasi reproduksi remaja (PIK RR)	Jumlah Remaja yang Mengikuti Pembinaan	900	1.200	105.757.000	1.500	90.750.000	1800	99.750.000	2.005	189.650.000	2300	120.550.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 16 02	Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengendalian penduduk	0	2 Klpk	49.794.000	2 Klpk	56.383.000	4 Klpk	61.383.000	4 Klpk	67.483.000	8 Klpk	74.183.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 16 03	Workshop / Pembinaan SSK	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pembinaan	0	-	-	-	-	4 Klpk	86.700.000	6 Klpk	95.300.000	8 Klpk	104.800.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 17	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Rumah Tangga Pra Sejahtera	0	23	62.302.000	28	128.566.000	30	193.066.000	36	210.360.000	36	210.360.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 17 01	Sosialisasi Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Masyarakat terhadap Pengendalian Penduduk	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi	1000	115	-	155	-	200 Org	55.600.000	200 Org	61.100.000	200 Org	67.300.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 17 02	Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB (BKB, BKR dan BKL)	Jumlah Masyarakat yang belum membentuk Kelembagaan	23 Klpk	14 Klpk	17.167.000	16 Klpk	39.560.000	16 Klpk	39.560.000	-	41.560.000	-	43.060.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 17 03	Pameran produksi dan Harganas	Cakupan Pengembangan dan Promosi Kegiatan UPPKS	3 Klpk	1 Klpk	45.135.000	1 Klpk	89.006.000	1 Klpk	97.906.000	1 Klpk	107.700.000	1 Klpk	116.500.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 18	Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang MANDIRI	Jumlah Kampung KB	76,9	77,21	284.768.000	78,02	201.815.000	81,02	221.900.000	92,09	244.000.000	100	246.500.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 18 01	Kamoung KB	Jumlah Pembentukan Kampung KB	1	3	284.768.000	23	201.815.000	35	221.900.000	65	244.000.000	108	246.500.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 19	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Pengembangan Pelayanan Informasi dan Konseling RR	12,06	12,76	101.583.000	29	122.598.000	37	221.398.000	43	387.275.000	50	254.898.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 19 01	Pendataan, Pemetaan, Pengumpulan Data Kependudukan dan KB	Jumlah Buku Data Kependudukan dan KB	0	-	-	-	-	-	-	100	239.000.000	-	-			DISOSP3AP2KB	
			06 01 19 02	Sosialisasi Dampak Keluarga Berencana terhadap pengendalian Penduduk	Jumlah PLKB / PKB yang mengikuti Sosialisasi	35 Org	35 Org	54.047.000	35 Org	66.523.000	30 Org	73.123.000	30 Org	80.650.000	30 Org	88.223.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 19 03	Workshop PLKB / PKB	Jumlah PLKB / PKB yang mengikuti Pelatihan	35 Org	-	-	-	-	30 Org	86.600.000	-	-	30 Org	92.300.000			DISOSP3AP2KB	
			06 01 19 04	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan	Cakupan Kinerja PLKB / PKB	35 Org	35 Org	47.536.000	35 Org	56.075.000	30 Org	61.675.000	30 Org	67.675.000	30 Org	74.375.000			DISOSP3AP2KB	
				JUMLAH																

Putussibau, Maret 2018
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU

MARTHA BANANG, S.H., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19651123 199203 2 001

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
									target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.		
1	2	4				5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Meningkatnya Kinerja DISOSP3AP2KB																					
	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	06	01	01		Program Administrasi Perkantoran	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya			1.766.281.000		1.938.142.600		2.132.756.960		2.346.734.210		2.581.707.531			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, dan Buku Cek BANK	0	200 Lembar dan 5 Buku	5.000.000	200 Lembar dan 5 buku	5.500.000	200 Lembar dan 5 buku	6.050.000		6.655.000		7.320.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran layanan komunikasi,sumber daya air dan listrik	0	36 Bulan	50.000.000	36 Bulan	55.000.000	36 Bulan	60.500.000	36 Bulan	66.550.000	36 Bulan	73.205.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	181.500.000	1 Paket	199.650.000	1 Paket	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4	0	5 Mobil, 20 Motor	30.000.000	5 Mobil, 20 Motor	30.300.000	5 Mobil, 20 Motor	33.330.000	5 Mobil, 20 Motor	36.663.000	5 Mobil, 20 Motor	40.329.300			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pembayaran honor bagi pejabat pengelola keuangan	0	216 Or	78.180.000	216 Or	85.998.000	216 Or	94.597.800	85%	104.057.580	90%	114.463.338			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Kantor	3 Orang	3 Orang	56.400.000	3 Orang	62.040.000	3 Orang	68.244.000	3 Orang	75.068.400	3 Orang	82.575.240			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja	0	75%	5.852.000	75%	6.437.200	80%	7.080.920	85%	7.891.000	90%	8.680.100			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK 1 Tahun	0	75%	21.330.000	75%	23.463.000	80%	25.809.300	85%	28.390.230	90%	31.229.253			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	95%	8.705.000	95%	12.909.000	95%	15.000.000	95%	17.000.000	95%	19.000.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	10	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan	Persentase Komponen Instalansi Listrik /	0	85%	15.000.000	85%	16.500.000	90%	18.150.000	95%	19.965.000	95%	21.961.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	80%	307.814.000	80%	338.595.400	85%	372.454.940	90%	408.800.000	95%	450.780.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PersentasePeralatan Rumah Tangga	0	75%	65.000.000	75%	71.500.000	80%	78.650.000	85%	86.515.000	90%	95.166.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	persentaseBahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0	75%	5.000.000	80%	5.500.000	85%	6.050.000	90%	6.655.000	95%	7.320.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	0	95%	72.000.000	95%	79.200.000	95%	87.120.000	95%	95.832.000	95%	105.415.200			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	95%	530.000.000	95%	583.000.000	95%	641.300.000	95%	705.430.000	95%	775.973.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	16	Raapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	0	95%	150.000.000	95%	165.000.000	95%	181.500.000	95%	199.650.000	95%	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	17	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Aparatur yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa	0	85%	30.000.000	85%	30.300.000	85%	33.330.000	90%	36.663.000	95%	40.329.300			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	18	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan OPD	0	90%	30.000.000	90%	30.300.000	90%	33.330.000	95%	36.663.000	95%	40.329.300			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	19	Penyusunan RKA - DPA OPD	Jumlah Dokumen	0	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.655.000	2 Dokumen	7.320.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	20	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pendukung Adminstrasi Kantor	0	4 Org	95.000.000	4 Org	104.500.000	4 Org	114.950.000	4 Org	126.445.000	4 Org	139.089.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	01	21	Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB	Persentase Rapat Kerja Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan KB	0	80%	61.000.000	85%	67.100.000	90%	73.810.000	90%	81.191.000	95%	89.310.000			DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"			1.395.000.000		1.534.500.000		1.687.950.000		1.856.745.000		2.042.419.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	80%	500.000.000	80%	550.000.000	85%	605.000.000	90%	665.500.000	95%	732.050.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor	0	80%	150.000.000	80%	165.000.000	85%	181.500.000	90%	199.650.000	95%	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	04	Pengadaan Mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	0	80%	150.000.000	80%	165.000.000	85%	181.500.000	90%	199.650.000	95%	219.615.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung	0	80%	100.000.000	80%	110.000.000	85%	121.000.000	90%	133.100.000	95%	146.410.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	0	80%	145.000.000	80%	159.500.000	85%	175.450.000	90%	192.995.000	95%	212.294.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung / Kantor	0	80%	50.000.000	80%	55.000.000	85%	60.500.000	90%	66.550.000	95%	73.205.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung / Kantor	Persentase Peralatan Gedung / Kantor	0	80%	50.000.000	80%	55.000.000	85%	60.500.000	90%	66.550.000	95%	73.205.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	02	09	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Persentase Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	0	80%	250.000.000	80%	275.000.000	85%	302.500.000	90%	332.750.000	95%	366.025.000			DISOSP3AP2KB	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya Disiplin Aparatur	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur dalam 1 Tahun			145.000.000		159.500.000		175.450.000		192.995.000		212.294.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	03	01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	0	80%	70.000.000	85%	77.000.000	90%	84.700.000	95%	93.170.000	95%	102.487.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	03	02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	0	80%	75.000.000	85%	82.500.000	90%	90.750.000	95%	99.825.000	95%	109.807.500			DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	06	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			241.000.000		265.100.000		291.610.000		320.771.000		352.848.100			DISOSP3AP2KB	
		06	02	04	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	80%	241.000.000	85%	265.100.000	90%	291.610.000	95%	320.771.000	95%	352.848.100			DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	06	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai IAKIP Perangkat Daerah			80.000.000		88.000.000		137.120.000		145.692.000		164.210.400			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	04 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	Jumlah Dokumen	0	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.800.000	2 Dokumen	9.680.000	2 Dokumen	10.649.000	2 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	05 Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.500.000	1 Dokumen	60.000.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	06 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	07 Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	08 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	09 Penyusunan IAKIP	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.649.000	1 Dokumen	11.713.800			DISOSP3AP2KB	
		06	01	05	10 Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.800.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000				
Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial																				
	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	06	01	06	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Direhabilitasi	0	-	-		169.329.500		820.502.000		902.552.200		992.807.420			DISOSP3AP2KB	
		06	01	06	01 Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	0	-	-	10 orang	39.850.000	20 orang	42.500.000	20 orang	46.750.000	20 orang	51.425.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	06	03 Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jumlah Tahun Pelayanan PMBS	0	-	-	1 tahun	12.837.000	1 tahun	12.837.000	1 tahun	14.120.700	1 tahun	15.532.770			DISOSP3AP2KB	
		06	01	06	04 Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	pemberdayaan dan bimbingan terhadap penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang penyakit kejiwaan	0	-	-	1 tahun	116.642.500	680 orang	405.165.000	680 orang	445.681.500	680 orang	490.249.650			DISOSP3AP2KB	
		06	01	06	05 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lansia yang dilayani	0	-	-	-	-	75 orang	360.000.000	75 orang	396.000.000	75 orang	435.600.000			DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	06	01	07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial			2.847.033.100		2.810.347.900		1.234.348.366		1.357.783.203		1.493.561.523		-	DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	01 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Kerja bagi Keluarga Miskin/Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelatihan	0	-	31.364.400	10 orang	41.153.000	20 orang	45.268.300	20 orang	49.795.130	20 orang	54.774.643			DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	02 Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang terlantar	Jumlah PMKS dan PSKS	0	-	22.170.500	85.000	28.207.500	85.000 jiwa	30.000.000	85.000 jiwa	33.000.000	85.000 jiwa	36.300.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	03 Mobilisasi dan pendistribusian bantuan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani	0	-	54.209.300	1 tahun	51.646.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	66.000.000	1 tahun	72.600.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	04 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	koordinasi dan sinkronisasi masalah kesejahteraan sosial	0	-	80.332.800	1 tahun	140.333.400	1 tahun	154.366.740	1 tahun	169.803.414	1 tahun	186.783.755			DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	05 Pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0	-	2.501.754.300	1 tahun	1.674.072.600	1 tahun	64.713.326	1 tahun	71.184.659	1 tahun	78.303.124			DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	06 Pembinaan kelompok usaha bersama dan program keluarga harapan	Jumlah masyarakat miskin dan PKH	0	-	157.201.800	1 tahun	174.935.400	50 orang	180.000.000	50 orang	198.000.000	50 orang	217.800.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	07	07 Pendampingan pelaksanaan bantuan beras sejahtera	Jumlah Masyarakat yang mendapat Bantuan Beras Sejahtera	0	-	-	1 Tahun	700.000.000	1 tahun	700.000.000	1 tahun	770.000.000	1 tahun	847.000.000			DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	06	01	08	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Pemberdayaan Sosial Aktif			244.532.700		285.915.900		335.534.900		369.088.390		405.997.229		-	DISOSP3AP2KB	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.		
1	2	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	06	01	08	01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	Persentase Pemeliharaan Makam Taman Pahlawan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	0	-	77.724.300	1 tahun	67.492.000	1 tahun	103.742.000	1 tahun	114.116.200	1 tahun	125.527.820		DISOSP3AP2KB	
		06	01	08	02	Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Lainnya	Jumlah PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Lainnya	0	-	166.808.400	1 kegiatan	218.423.900	27 orang	231.792.900	27 orang	254.972.190	27 orang	280.469.409		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	06	01	09	01	Sosialisasi UU PKDRT, UU Trafficking	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	0	-	29.522.500	-	-	120 Org	92.474.750	120 Org	101.722.225	120 Org	111.894.448		DISOSP3AP2KB	
		06	01	09	02	Perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah PERDA	0	-	-	-	-	1 Perda	50.000.000	1 Perda	55.000.000	1 Perda	60.500.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	06	01	09	03	Penguatan Kelembagaan P2TP2A	Meningkatnya Kelembagaan P2TP2A	0	-	-	-	-	1 Lembaga	125.000.000	1 Lembaga	137.500.000	1 Lembaga	151.250.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	09	04	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan	Teleksananya Kegiatan KIE	0	-	-	-	-	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	27.500.000	1 Kegiatan	30.250.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	06	01	09	05	Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Partisipan dalam Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	-	-	-	-	150 Orang	100.000.000	150 Orang	110.000.000	150 Orang	121.000.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	09	06	Penguatan Kelembagaan KLA	Jumlah Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	60.000.000	1 Lembaga	66.000.000	1 Lembaga	72.600.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	06	01	09	07	Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan PATBM	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	0	-	-	-	-	120 Org	50.000.000	120 Org	55.000.000	120 Org	60.500.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	10	01	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	0	-	89.736.500	120 Org	122.479.500	125 Org	134.727.450	125 Org	148.200.195	125 Org	163.020.215		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	06	01	10	02	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional	0	-	13.566.000	250 Org	27.716.000	250 Org	55.000.000	250 Org	60.500.000	250 Org	66.550.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	10	03	Perda Perlindungan Anak	Jumlah PERDA	0	-	-	-	-	1 Perda	250.000.000	1 Perda	275.000.000	1 Perda	302.500.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	06	01	10	04	Advokasi, sosialisasi dan pembentukan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peserta dari Pemerintah, Masyarakat dan	0	-	-	80 Org	55.487.000	80 Org	70.000.000	80 Org	77.000.000	80 Org	84.700.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	10	06	Fasilitasi Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	Jumlah Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	0	-	-	-	-	10 Orang	55.000.000	10 Orang	60.500.000	10 Orang	66.550.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	06	01	10	07	Fasilitasi Penanganan Anak berhadapan dengan hukum	Jumlah Anak yang tertangani	0	-	-	-	-	20 Orang	60.000.000	20 Orang	66.000.000	20 Orang	72.600.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	10	08	Perda Kabupaten Layak Anak	Jumlah Perda	0	-	-	-	-	-	-	1 Perda	125.000.000	1 Perda	150.000.000		DISOSP3AP2KB	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	01	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	0	-	89.736.500	120 Org	122.479.500	125 Org	134.727.450	125 Org	148.200.195	125 Org	163.020.215		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	02	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional	0	-	13.566.000	250 Org	27.716.000	250 Org	55.000.000	250 Org	60.500.000	250 Org	66.550.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	03	Perda Perlindungan Anak	Jumlah PERDA	0	-	-	-	-	1 Perda	250.000.000	1 Perda	275.000.000	1 Perda	302.500.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	04	Advokasi, sosialisasi dan pembentukan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peserta dari Pemerintah, Masyarakat dan	0	-	-	80 Org	55.487.000	80 Org	70.000.000	80 Org	77.000.000	80 Org	84.700.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	06	Fasilitasi Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	Jumlah Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	0	-	-	-	-	10 Orang	55.000.000	10 Orang	60.500.000	10 Orang	66.550.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	07	Fasilitasi Penanganan Anak berhadapan dengan hukum	Jumlah Anak yang tertangani	0	-	-	-	-	20 Orang	60.000.000	20 Orang	66.000.000	20 Orang	72.600.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	08	Perda Kabupaten Layak Anak	Jumlah Perda	0	-	-	-	-	-	-	1 Perda	125.000.000	1 Perda	150.000.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	09	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	0	-	89.736.500	120 Org	122.479.500	125 Org	134.727.450	125 Org	148.200.195	125 Org	163.020.215		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	10	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional	0	-	13.566.000	250 Org	27.716.000	250 Org	55.000.000	250 Org	60.500.000	250 Org	66.550.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	11	Perda Perlindungan Anak	Jumlah PERDA	0	-	-	-	-	1 Perda	250.000.000	1 Perda	275.000.000	1 Perda	302.500.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	12	Advokasi, sosialisasi dan pembentukan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peserta dari Pemerintah, Masyarakat dan	0	-	-	80 Org	55.487.000	80 Org	70.000.000	80 Org	77.000.000	80 Org	84.700.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	13	Fasilitasi Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	Jumlah Anak Korban Kekerasan dan Trafficking	0	-	-	-	-	10 Orang	55.000.000	10 Orang	60.500.000	10 Orang	66.550.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	14	Fasilitasi Penanganan Anak berhadapan dengan hukum	Jumlah Anak yang tertangani	0	-	-	-	-	20 Orang	60.000.000	20 Orang	66.000.000	20 Orang	72.600.000		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	15	Perda Kabupaten Layak Anak	Jumlah Perda	0	-	-	-	-	-	-	1 Perda	125.000.000	1 Perda	150.000.000		DISOSP3AP2KB	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	06	01	11	16	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah	0	-	89.736.500	120 Org	122.479.500	125 Org	134.727.450	125 Org	148.200.195	125 Org	163.020.215		DISOSP3AP2KB	
		06	01	11	17	Peringatan Hari Anak Nasional	Jumlah berperan serta dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional	0	-	13.566.000	250 Org	27.716.000	250 Org	55.000.000	250 Org	60.500.000	250 Org	66.550.000		DISOSP3AP2KB	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.	target	Kp.					
1	2	4	5			6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Meningkatnya Jumlah Akseptor KB	06	01	11	13	Rapat-rapat Koordinasi tentang PUG	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi tentang PUG	0	-	-	-	-	250.000.000		275.000.000		302.500.000			DISOSP3AP2KB		
		06	01	11	14	Peringatan Hari Kartini	Jumlah Peserta	0	-	50.730.800	300 Org	27.686.000	300 Org	35.000.000	300 Org	38.500.000	300 Org	42.350.000			DISOSP3AP2KB	
																					DISOSP3AP2KB	
		06	01	12		Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB			438.274.000		409.155.000		595.019.000		654.520.900		719.972.990				
		06	01	12	01	TNI MANUNGGA - KB KESEHATAN	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	0	-	51.573.000	-	56.393.000	312 Akseptor	100.000.000	312 Akseptor	110.000.000	312 Akseptor	121.000.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	12	02	Kesehatan Gerak Bhayangkaran - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	0	-	48.888.000	-	55.188.000	396	100.000.000	396	110.000.000	396	121.000.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	12	03	Kesatuan Barak PKK - KB Kesehatan	Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani	0	-	97.335.000	-	95.759.000	273 Akseptor	105.319.000	273 Akseptor	115.850.900	273 Akseptor	127.435.990			DISOSP3AP2KB	
		06	01	12	04	Kampung KB	Jumlah pembentukan kampung KB	0	-	240.478.000	-	201.815.000	35 Desa	221.900.000	35 Desa	244.090.000	35 Desa	268.499.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	12	05	Operasional Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	jumlah akseptor kb yang mendapatkan pelayanan	0	-	-	-	-	300	67.800.000	300	74.580.000	300	82.038.000			DISOSP3AP2KB	
			Meningkatnya Pengembangan Masyarakat Peduli KB	06	01	13	Program Keluarga Sejahtera	Cakupan Pengembangan pelayanan informasi dan konseling KRR, BKB, BKR dan BKL			122.924.000		219.316.000		276.156.000		303.771.600		334.148.760			DISOSP3AP2KB
		06	01	13	01	Pembinaan Genre dan pusat informasi dan konsultasi remaja (PIK-RR)	jumlah remaja yang mengikuti pembinaan	0	-	105.757.000	-	90.750.000	1.800	99.750.000	1.800	109.725.000	1.800	120.697.500			DISOSP3AP2KB	
		06	01	13	02	Pebinaan kelompok masyarakat peduli kb (BKB,BKR dan BKL)	jumlah masyarakat yang belum membentuk	0	-	17.167.000	3 Kelompok	39.560.000	16 Kelompok	50.500.000	16 Kelompok	55.550.000	16 Kelompok	61.105.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	13	03	Pameran produksi dan HARGANAS	Cakupan pengembangan dan promosi kegiatan UPPKS	0	-	-	-	89.006.000	1 Kelompok	125.906.000	1 Kelompok	138.496.600	1 Kelompok	152.346.260			DISOSP3AP2KB	
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	06	01	14	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerja sama organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga			54.047.000		56.083.000		407.558.000		448.313.800		493.145.180			DISOSP3AP2KB		
		06	01	14	01	Sosialisasi persiapan pembentukan sekolah siaga kependudukan	jumlah sekolah yang belum terbentuk ssk	0	-	-	-	56.083.000	4 Kelompok	61.383.000	4 Kelompok	67.521.300	4 Kelompok	74.273.430			DISOSP3AP2KB	
		06	01	14	02	workshop/pembinaan SSK	jumlah siswa yang mengikuti pembinaan	0	-	-	-	-	4 Kelompok	86.700.000	4 Kelompok	95.370.000	4 Kelompok	104.907.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	14	03	Sosialisasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian penduduk	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	0	-	-	-	200 Orang	55.600.000	200 Orang	61.160.000	200 Orang	67.276.000			DISOSP3AP2KB		
		06	01	14	04	Sosialisasi dampak keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	0	-	54.047.000	-	-	200 Orang	55.600.000	200 Orang	61.160.000	200 Orang	67.276.000			DISOSP3AP2KB	
		06	01	14	05	Workshop PLKB/PKB	jumlah PLKB/PKB	0	-	-	-	30 Orang	86.600.000	30 Orang	95.260.000	30 Orang	104.786.000			DISOSP3AP2KB		
		06	01	14	06	Monitoring, evaluasi dan pembinaan	Jumlah Kecamatan	0	-	-	-	30 Orang	61.675.000	30 Orang	67.842.500	30 Orang	74.626.750			DISOSP3AP2KB		
					JUMLAH				7.517.647.600		8.141.072.400		10.924.798.023		12.137.839.379		13.368.372.417					

Putussibau,
a.n. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. Durus., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198403 1 016